



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

*Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024
Guna Mendukung SDG'S Indonesia 2045*

**Edisi 1
Desember 2019**

**Penerbit
STIE BANK BPD JATENG**

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS

STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)

2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024

Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”



Penerbit

STIE Bank BPD Jateng

Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,

Kota Semarang (50196)

stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF)
2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”

ISBN

9786027436725

Editor

Fika Azmi, SE, M.Si

Tebal Buku

574 Halaman

Edisi

Satu, Desember 2019

Publikasi Online

stiebankbpdjateng.ac.id/saf

Penerbit

STIE Bank BPD Jateng
Jalan Arteri Soekarno - Hatta No. 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,
Kota Semarang (50196)
stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

PANITIA PELAKSANA

SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS
STIE BPD ACCOUNTING FORUM (SAF) 2019

“Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 – 2024 Guna Mendukung SDG’s Indonesia 2045”

Penasehat	:	Dr. E. Siti Puryandani, SE, M.Si.
Steering Committee	:	1. Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC. 2. Mekani Vestari, SE, M.Si, Ak.,CA. 3. Himawan Arif Sutanto, SE, M.Si.
Ketua	:	Nugroho Heri Pramono, SE, M.Si.
Sekretaris	:	Suci Atiningsih, S.Pd, M.Si.
Bendahara	:	Khairina Nur Izzaty, SE, M.Si, Ak.
Sie Acara & Protokoler	:	Taufik Andre Setiyono, SE, M.Ak.
Sie Artikel	:	Fika Azmi, SE, M.Si.
Sie Humas	:	Pratomo Cahyo Kurniawan, SE, M.Ak.

Reviewer

Dr. Taofik Hidajat, SE, M.Si, CRBC.
Dr. Grace Tianna Solovida, SE, M.Si, Ak, CA
Ali Mursid, P.hD

Editor

Fika Azmi, SE, M.Si

Penerbit

STIE Bank BPD Jateng
Jalan Arteri Soekarno Hatta No 88, Tlogosari Kulon, Pedurungan,
Kota Semarang (50196)
stiebankbpdjateng.publisher@gmail.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
PANITIA PELAKSANA	iv
DAFTAR ISI	v

A. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN I

1. PENGARUH *CURRENT RATIO* (CR), *RETURN ON EQUITY* (ROE), *DEBT TO EQUITY* (DER), & *NET PROFIT MARGIN* (NRM) TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN
(Ika Agustina N. & Suyatmin Waskito A.) 1 - 25
2. KENAIKAN HARGA ROKOK TERHADAP KONSUMSI ROKOK DI KOTA SEMARANG
(Penta Widyartati, Ariyani Indriastuti, & Ira Setiawati) 26 - 35
3. ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, *FIRM SIZE*, *MEDIA EXPOSURE*, *LEVERAGE*, & UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP *CSR DISCLOSURE*
(Nursiam & Shinta Dwi Rahayu) 36 - 45
4. PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *LEVERAGE*, & PROFITABILITAS TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Alfiyatul Maziyah & lin Indarti)..... 46 - 59
5. PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *DEBT TO EQUITY RATIO*, *CURRENT RATIO*, ARUS KAS OPERASI, & PERTUMBUHAN PENJULAN TERHADAP RETURN SAHAM
(Nursiam & Silmi Agustin) 60 - 70
6. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, *AUDIT FEE* & KUALITAS AUDIT TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2018)
(Titik Purwanti, Nawang Kalbuana, & Fiqi Rahmawati) 71 - 85
7. *FINANCIAL RISK DISCLOSURE* & TATA KELOLA PERUSAHAAN KEUANGAN PERIODE 2016-2018
(Shinta Permata Sari & Himmatus Sholikhah) 86 - 99

B. SUB TEMA: AKUNTANSI KEUANGAN II

1. PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL BANK, JUMLAH KANTOR CABANG, TINGKAT SUKU BUNGA & JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP JUMLAH KREDIT UMKM BANK BUMN
(Ade Onny Siagian)..... 100 - 127
2. PENERIMAAN PAJAK YANG DIMODERASI KUALITAS PELAYANAN FISKUS (STUDI PADA WPOP YANG MEMPUNYAI USAHA & BADAN KPP PRATAMA CANDISARI KOTA SEMARANG
(Mohklas) 128 - 137
3. PENGARUH LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, & *LEVERAGE* TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Athaya Salsabila & Rina Trisnawati)..... 138 - 158

4. PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, RASIO RETENSI SENDIRI, RASIO BEBAN IKLAN, & *RISK BASED CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
(Dwi Wahyu Pujiharjo)..... 159 - 176
5. FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015-2017
(Wima Nurhidayanto) 177 - 189

C. SUB TEMA: AKUNTANSI & CORPORATE GOVERNANCE

1. *CORPORATE GOVERNANCE & CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*: TINJAUAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
(Shinta Permata Sari & Agustina Maya Sari) 190 - 202
2. PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UMUR LISTING & *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE* (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR *FOOD & BEVERAGE* YANG TERDAFTAR PADA PERUSAHAAN DI BEI PERIODE 2014-2017)
(Mela Susmawati) 203 - 218
3. PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ45 TAHUN 2014-2018)
(Benny Kurnianto, Nawang Kalbuana, & Umi Rianesa Rusiati) 219 - 232
4. PENGARUH RUANG FISKAL, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, & DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
(Putriana Indah Budi Astuti & Andi Dwi Bayu Bawono)..... 233 - 269
5. PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP PROFITABILITAS
(Nindya Ardita Nur Amni, Dwi Intan Susiloningrum, & Iin Indarti)..... 270 - 285
6. ANALISIS PENGARUH *FEE BASED INCOME*, PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA, UKURAN PERUSAHAAN, & KONDISI EKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS BANK
(Jihan Okti Amaliah & Widhy Setyowati) 286 - 303
7. PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, & KONTROL PERILAKU TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK HOTEL, RESTORAN, & HIBURAN DI KOTA TEGAL)
(Asrofi Langgeng N. & Ibnun Aslamadin) 304 - 318
8. ANALISIS KEUANGAN & NON KEUANGAN CALON DEBITUR TERHADAP EFEKTIFITAS PEMBERIAN KREDIT PADA PD BPR BKK PURBALINGGA
(Anggita Ratnaningtyas & Widhy Setyowati)..... 319 - 332
9. PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL & PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN INVESTASI SWASTA SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Febri Rachmawati & Rina Trisnawati)..... 333 - 349

10. PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL & TRANSPARANSI INFORMASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Fitria Ulfa & Suci Atiningsih) 350 - 358

D. SUB TEMA: AKUNTANSI SYARIAH

1. PENGARUH *SHARIA CONFORMITY & ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL PERBANKAN SYARIAH (Rusmiyatun & Nur Edi Cahyono) 359 - 376
2. IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK BNI CABANG SYARIAH SEMARANG (Siti Hasanah, Suryani Sri Lestari, Siti Mutmainah, & Iwan Budiyono) 377 - 387
3. PERKEMBANGAN, TANTANGAN, & PERAN *SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS)* DI PASAR MODAL SYARIAH DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (Muhammad Andryzal Fajar) 388 - 400
4. KINERJA KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR PADA *JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)* PERIODE TAHUN 2016-2018 (Suryakusuma Kholid H & Siti Puryandani) 401 - 409
5. MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL SEJAHTERA MANDIRI (Erika Zunita Cahyani & Fika Azmi) 410 - 421

E. SUB TEMA: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

1. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PERSENTASE KEMISKINAN, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA FUNGSI EKONOMI DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS DI KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2018) (Ayustika Isminanda & Andy Dwi Bayu Bawono) 422 - 443
2. PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, *FREE CASH FLOW*, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, & UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DEVIDEN (Fachriyatul Millah & Mekani Vestari) 444 - 459
3. PENGARUH RUANG FISKAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PERSENTASE KEMISKINAN TERHADAP BELANJA FUNGSI KESEHATAN DI INDONESIA (Ina Sari Darmastuti & Andy Dwi Bayu Bawono) 460 - 477
4. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK & KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Wa Ode Aprisilia Zahratul Aziz & Muhammad Yusuf) 478 - 493
5. PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, & *JOB RELEVANT INFORMATION* TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN (Yustinus Hutama Marianus & Suci Atiningsih) 494 - 506

F. SUB TEMA: TOPIK LAIN YANG RELEVAN

1. PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGALAMAN KEUANGAN, & SIKAP MONETER KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN KEPEMILIKAN ASURANSI JIWA PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG PANCORAN MAS DEPOK
(Syahvira Septiarizk & Nurhidayati Dwiningsih) 507 - 522
2. ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI PROFESIONAL TERHADAP KINERJA SDM (STUDI EMPIRIK PADA PT. ADJITAMA PERSADA JAKARTA)
(Biatmoko Agung Nugroho, Endah Winarti HS, & Harnoto) 523 - 536
3. APAKAH *CELEBRITY ENDORSEMENT* PRODUK HALAL DAN CITRA MEREK BERPENGARUH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN *SKIN CARE* SAFI?
(Desi Tya Astuti & Francy Iriani) 537 - 549
4. PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA, KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL & KETERLIBATAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASIONAL
(Kertati Sumekar, Sri Mulyani, & Zulfa Deviga Octaviana) 550 - 564
5. PRODUK HALAL DAN MINAT BELI KONSUMEN
(Budi Suryowati & Irpiani)..... 565 - 574

**Pengaruh Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Kemiskinan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Fungsi Ekonomi Di Indonesia
(Studi Empiris di Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2018)**

Ayustika Isminanda¹, Andy Dwi Bayu Bawono²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: ayustikaisminanda@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta
email: andi.bawono@ums.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of Fiscal Space, Local Own Revenue, Poverty Rate, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds for Economic Expenditures Function (Empirical Study in Districts/Cities throughout in Indonesia Fiscal Budget 2018). This research is a quantitative study. The sample used in this study were 505 data from districts and cities in Indonesia, which taken by purposive sampling technique. Data obtained from the Budget Realization Report of Local Revenue and Expenditure (APBD) 2018 and Poverty Statistics Data 2018 that were accessed through the websites of www.djpk.kemenkeu.go.id and www.bps.go.id. The results shows that Fiscal Space, Local Own Revenue, Poverty Rate, General Allocation Funds have a significant effect to the Economic Expenditures Function. Whereas the Special Allocation Fund has no significant effect to the Economic Expenditures Function.

Keywords: Fiscal Space, Local Own Revenue, Poverty Rate, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Economic Expenditures Function.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Prosentasi Kemiskinan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Fungsi Ekonomi (Studi Empiris di Kabupaten/Kota se-Indonesia Tahun 2018). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 505 data dari Kabupaten dan Kota di Indonesia, yang diambil dengan teknik *purposive sampling*. Data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 dan Data Statistik Kemiskinan Tahun 2018 yang diakses melalui website www.djpk.kemenkeu.go.id dan www.bps.go.id. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Kemiskinan, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Fungsi Ekonomi. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Fungsi Ekonomi.

Kata Kunci: Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Prosentasi Kemiskinan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Fungsi Ekonomi.

1. Pendahuluan

Belanja negara berperan penting dalam usaha penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada pengelolaan belanja negara yang baik. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan belanja negara yang menjadi tugas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan belanja negara secara optimal ditujukan untuk pelayanan publik dalam usaha mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Enjarwati, Tria dan Djoko Mursinto (2018) bahwa Ruang Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 1990-2015.

Menurut artikel dari Antara News (2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan ada lima hal yang menjadi fokus belanja pemerintah pusat tahun 2020 antara lain mencakup peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, infrastruktur, dan transformasi birokrasi dengan mengedepankan teknologi. Akselerasi pembangunan infrastruktur dialokasikan sebesar Rp. 419,2 Triliun. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi dan ekspor. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan transformasi birokrasi yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi merupakan beberapa contoh dari belanja pemerintah fungsi ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Enjarwati, Tria dan Djoko Mursinto (2018) bahwa Ruang Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 1990-2015.

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan LKPP TA (2010), menyatakan ruang fiskal secara umum merupakan ketersediaan ruang dalam anggaran yang memungkinkan pemerintah menyediakan dana untuk tujuan tertentu tanpa menciptakan permasalahan dalam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Dalam konteks APBN, ruang fiskal adalah total pengeluaran dikurangi dengan belanja non diskresioner/terikat seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bawono et al. (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi Indeks Kapasitas Fiskal daerah justru membuat alokasi belanja wajib bidang kesehatan semakin rendah, dengan alasan jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi sehingga mengakibatkan jumlah indeks Kapasitas Fiskal (IDF) dengan persentase kecil. Terkait dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bawono et al. (2017), peneliti akan mengubah variabel independen Kapasitas Fiskal menjadi Ruang Fiskal. Peneliti juga akan menambahkan beberapa variabel independen lain untuk menunjang penelitian.

Menurut Mahmudi (2016), “penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan”. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan mampu memberikan pelayanan sektor publik secara merata. Meningkatnya pelayanan publik juga dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka peluang usaha. Hal ini dapat terwujud apabila pemerintah dapat memberikan alokasi belanja yang besar untuk daerah-daerah di Indonesia. Menurut penelitian dari Syam, et al (2018) bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Syam et al. (2018) terdapat pada variabel dependen yang diambil yaitu Belanja Fungsi Ekonomi.

Berdasarkan artikel Money Smart (2019), “Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41%. Angka ini mengalami penurunan 0,25% terhadap September 2018 dan menurun 0,41% poin terhadap Maret 2018”. Kemiskinan masih menjadi suatu persoalan yang tidak bisa terlepas dari suatu negara yang sedang

berkembang. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, namun kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang bertaraf hidup rendah. Persoalan kemiskinan yang tidak kunjung tuntas seperti ini dapat menghambat pembangunan ekonomi. Upaya pengentasan kemiskinan masih harus perlu ditingkatkan lagi, agar perekonomian Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Menurut penelitian dari Amalia, Sekar Indah dan Wahyono (2019) bahwa Jumlah Penduduk Miskin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial. Penelitian ini mengubah variabel independen Jumlah Penduduk Miskin menjadi Persentase Kemiskinan yang disesuaikan dengan variabel dependen yang diambil yaitu berupa Belanja Fungsi Ekonomi.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Belanja daerah sangat bergantung terhadap sumber-sumber penerimaan salah satunya adalah dana perimbangan. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Wahyono (2019) bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial, dan penelitian dari Kurniasari dan Mujiyati (2019) bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Wahyono (2019) dan Kurniasari dan Mujiyati (2019) dengan penelitian ini terdapat pada variabel dependen yang diambil yaitu Belanja Fungsi Ekonomi. Pelaksanaan penelitian yang berfokus pada Belanja Fungsi Ekonomi di Indonesia masih sangat jarang ditemukan pada literatur-literatur yang tersedia. Sebagian besar literatur yang tersedia hanya meneliti tentang keterkaitan variabel-variabel independen dengan variabel dependen yaitu Belanja Modal. Dengan keterbatasan tersebut, peneliti ingin menambah wawasan dengan melakukan penelitian secara empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Fungsi Ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh hasil atau informasi yang dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Kemiskinan, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Fungsi Ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data terkait pada tiap Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2018. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sehingga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Tinjauan Pustaka

a. Teori Otonomi Daerah

Menurut Sun'an dan Senuk (2015) dalam penelitian Christia dan Budi (2019), menyebutkan bahwa pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain penyediaan barang-barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*) dapat lebih terjamin.

Di dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah (Kharisma, 2013). Menurut Hadi dan Saragih (2013), menyatakan bahwa konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah).

b. Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun'an dan Senuk, 2017).

Kebijakan desentralisasi fiskal memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Pemerintah Daerah dapat merumuskan peraturan daerah mengenai desentralisasi fiskal di daerahnya berdasarkan hal-hal tersebut agar pengambilan keputusan lebih didengarkan oleh masyarakat karena sesuai dengan karakter dan potensi daerah. Karena itu, hubungan antara ketimpangan dan tuntutan otonomi kompleks dan bergantung pada karakteristik daerah (Sambanis & Milanovic, 2014).

c. Teori Anggaran dari Akuntansi Manajemen

Menurut Mardiasmo (2002:31) dalam *Institute of Management Accountants* (1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajemen publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengendalian tidak dapat dilakukan tanpa informasi yang memadai (Mardiasmo, 2002:31).

Menurut Mardiasmo (2002:37), menjelaskan bahwa dalam organisasi sektor publik, perencanaan dimulai sejak dilakukannya perencanaan strategik, sedangkan pengendalian dilakukan terhadap pengendalian tugas (*task control*). Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi:

- a. Perencanaan strategik
- b. Pemberian informasi biaya
- c. Penilaian investasi
- d. Penganggaran

- e. Penentuan biaya pelayanan (cost of services) dan penentuan tarif pelayanan (charging for services), dan
- f. Penilaian kinerja

Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Terkait dengan tiga fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses mengalokasikan dan mendistribusikan sumber dana publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata (Mardiasmo, 2002:41-42).

d. Ruang Fiskal

Berdasarkan artikel dalam blog *International Monetary Fund* (2018), ruang fiskal tidak ditentukan hanya oleh tingkat utang pemerintah suatu negara, dan bukan juga merupakan suatu konsep statis. Ruang fiskal dapat berubah seiring kondisi pasar dan ekonomi, kadang-kadang dengan cukup cepat dan substansial. Sebagai contoh, ketika suatu negara melakukan stimulus fiskal yang dilaksanakan dengan baik, dorongan dinamis bagi kegiatan ekonomi bisa lebih besar daripada kemunduran awal dalam posisi fiskalnya. Sebagai hasilnya, rasio utang pemerintah terhadap PDB negara tersebut dapat benar-benar membaik seiring berjalannya waktu, sehingga menciptakan ruang fiskal tambahan.

Peningkatan ruang fiskal dalam pengelolaan anggaran belanja negara dapat meningkatkan pembangunan nasional yang sudah menjadi tujuan negara. Pengelolaan belanja negara yang memadai, akan berdampak positif bagi ruang fiskal. Semakin baik pengelolaan belanja negara, ruang fiskal akan semakin efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan nasional dan dapat membantu dalam penurunan tingkat kemiskinan.

e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan artikel Negara Hukum (2011), mengatakan pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang harus dikelola dengan baik demi keberlangsungan pembangunan daerah. Suatu daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah besar, cenderung lebih mandiri dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya. Hal ini dikarenakan daerah tersebut. Selain itu, suatu daerah yang memiliki PAD yang besar, pertumbuhan daerahnya akan cenderung lebih pesat dari daerah lain.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah (Rozali Abdullah, 2002).

f. Persentase Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum ada solusi yang optimal dalam penanganannya. Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sudah banyak dilakukan, namun masih saja belum didapatkan hasil yang sesuai dengan harapan.

Persoalan kemiskinan yang dibiarkan terjadi terus menerus akan berdampak buruk bagi pertumbuhan suatu negara.

Penelitian Alfista (2019), menyebutkan “kemiskinan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah inflasi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi, serta ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan dengan realita yang terjadi di lapangan”. Faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling mempengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multi faktor. Namun demikian secara garis besar faktor dominan yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan diantaranya; pendidikan, pendapatan, lokasi, keterbatasan akses diantaranya akses ke kesehatan, keuangan dan pelayanan publik lainnya, (Nurwati, 2008).

Menurut Leasiwal (2013), menyatakan semakin banyak penduduk miskin di suatu wilayah maka semakin tidak sejahtera wilayah tersebut, sebaliknya semakin sedikit jumlah dan persentase penduduk miskinnya maka hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduknya.

g. Dana Alokasi Umum (DAU)

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum. Dibeberapa daerah peran Dana Alokasi Umum sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah (Sidik et al, 2002).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. “Salah satu peran Dana Alokasi Umum adalah untuk pemerataan horizontal yaitu dengan menutup celah fiskal yang berada diantara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi yang dimiliki daerah” (Mentayani dan Rusmanto, 2013).

h. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang (Marianus, Rudy, 2016).

Menurut Ardhani dalam Wandira (2013), menyatakan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.

i. Belanja Fungsi Ekonomi

Berdasarkan artikel Media Indonesia (2019), menyebutkan bahwa pada tahun 2018 pemerintah berfokus dalam melaksanakan berbagai prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta perlindungan lingkungan. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp. 1.453,6 Triliun yang dialokasikan ke beberapa prioritas, antara lain:

- a. Pariwisata (7,2 Triliun)
- b. Agama (9,1 Triliun)
- c. Perlindungan Lingkungan Hidup (15,2 Triliun)
- d. Perumahan dan Fasilitas Umum (29,9 Triliun)
- e. Kesehatan (64,3 Triliun)
- f. Pertahanan (107,6 Triliun)
- g. Ketertiban dan Keamanan (131,9 Triliun)
- h. Pendidikan (141,9 Triliun)
- i. Perlindungan Sosial (161,5 Triliun)
- j. Ekonomi (355,1 Triliun)
- k. Pelayanan Umum (429,9 Triliun)

Pembangunan nasional semakin terasa di era sekarang ini. Hal ini dibuktikan dengan semakin gencarnya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, maupun sarana transportasi. Fokus prioritas pemerintah dalam fungsi ekonomi juga dirasakan dengan semakin maraknya pengembangan produk UMKM dari masyarakat. Hal ini akan berdampak positif bagi pembangunan nasional mengingat pemerintah telah memberikan fasilitas publik agar mobilisasi lebih mudah serta diharapkan sumber daya manusia yang ada akan lebih kreatif dan mandiri.

2.2. Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Ruang Fiskal terhadap Belanja Fungsi Ekonomi.

Pada penelitian Tria dan Djoko (2018), menyebutkan bahwa *State Budget (APBN) is a tool that can be used by the government to be able to realize the goals of national development. APBN is expected to expand to stimulate more productive economic activities and to encourage economic growth to bring prosperity to the community. The ability of the state budget to expand through the provision of fiscal space with regard to the ability of state finances and economic conditions.*

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa "*Belanja Negara (APBN) merupakan sebuah alat yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan nasional. APBN diharapkan dapat berkembang guna untuk merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran masyarakat. Kemampuan belanja negara dapat berkembang melalui penyediaan ruang fiskal yang berkaitan dengan kemampuan negara dalam mengelola keuangan dan kondisi ekonominya*".

Ini berarti terdapat adanya kemungkinan keterkaitan ruang fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Fokus pengelolaan belanja negara oleh pemerintah salah satunya ditujukan agar terciptanya ketersediaan ruang fiskal. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan ruang fiskal akan berdampak baik bagi kondisi perekonomian dan pertumbuhan suatu negara.

H₁: Ruang Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Fungsi Ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan sektor publik. Pengelolaan pelayanan sektor publik yang baik sudah menjadi tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan publik yang meningkat diharapkan mampu meningkatkan daya tarik bagi para penanam modal atau investor untuk membuka usaha di daerahnya.

Maka dari itu, pemerintah perlu memberikan alokasi anggaran belanja yang besar ke setiap daerah untuk keperluan rumah tangganya. Dengan demikian, semakin besar anggaran belanja yang didistribusikan ke daerah, akan semakin mandiri pula suatu daerah tersebut dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri.

H₂: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi.**c. Pengaruh Persentase Kemiskinan terhadap Belanja Fungsi Ekonomi.**

Menurut Nurwati (2008), faktor penyebab kemiskinan sangat kompleks dan saling mempengaruhi, artinya kemiskinan terjadi bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi multi faktor. Namun demikian secara garis besar faktor dominan yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan diantaranya; pendidikan, pendapatan, lokasi, keterbatasan akses diantaranya akses ke kesehatan, keuangan dan pelayanan publik lainnya.

H₃: Persentase Kemiskinan berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi.**d. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Fungsi Ekonomi.**

Menurut Marianus (2016), mengatakan bahwa Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum diberikan pemerintah pusat ke setiap daerah untuk meningkatkan pelayanan di daerah serta membantu dalam pemenuhan kebutuhan di daerah tertentu. Adanya Dana Alokasi Umum juga mampu mengurangi ketimpangan perekonomian suatu daerah. Pemerataan menjadi tujuan utama pemerintah dalam pendistribusian Dana Alokasi Umum ini.

H₄: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi.**e. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Fungsi Ekonomi.**

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang (Marianus, Rudy, 2016).

Selain pendistribusian Dana Alokasi Umum, pemerintah juga mengalokasikan Dana Alokasi Khusus dalam dana perimbangan. Dengan diberikannya Dana Alokasi Khusus oleh pemerintah, suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan publiknya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Apabila kesejahteraan masyarakat meningkat, dapat mendorong tumbuhnya perekonomian negara.

H₅: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:8), penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

3.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017: 38). Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel terikat (*dependent*) dan variabel bebas (*independent*).

a. Variable terikat (*dependent*)

Menurut Sugiyono (2017: 39) variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Belanja Fungsi Ekonomi (BFE).

b. Variable bebas (*independent*)

Menurut Sugiyono (2017: 39), variabel independen adalah variabel yang sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independent pada penelitian ini, antara lain:

1) Ruang Fiskal (RF)

Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan LKPP (2010), ruang fiskal adalah total pengeluaran dikurangi dengan belanja non diskresioner atau belanja terikat seperti belanja pegawai, pembayaran bunga, subsidi, dan pengeluaran yang dialokasikan untuk daerah. Rumus:

$$RF = PD - (DAK + PH + DOK \text{ dan } DP + DD) - (BP + BB)$$

Keterangan:

RF	: Ruang Fiskal
PD	: Pendapatan Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
PH	: Pendapatan Hibah
DOK	: Dana Otonomi Khusus
DP	: Dana Penyesuaian
DD	: Dana Darurat
BP	: Belanja Pegawai
BB	: Belanja Bunga

2) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Bastian (2006) menyebutkan bahwa jenis Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rumus:

$$PAD = PD + RD + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah} - \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

3) Persentase Kemiskinan (PK)

Dalam penelitian Alfista (2019), sejak era reformasi, persentase penduduk miskin menurun. Hingga Maret 2017 (Semester I), jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mencapai 27,77 juta jiwa atau berkurang jika dibandingkan dengan bulan September 2016 sebesar 27,76 juta jiwa. Secara persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2017 adalah 10,64% atau terendah sejak 20 tahun terakhir. Adapun rumus untuk menentukan persentase kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

α : 0

z : garis kemiskinan

y_i : rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q : banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : jumlah penduduk

4) Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, formula Dana Alokasi Umum menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah. Rumus:

$$DAU = AD - CF$$

Keterangan:

AD : Alokasi Dasar, merupakan gaji PNS daerah

CF : Celah Fiskal, diperoleh dari (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal)

5) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, mekanisme pengalokasian Dana Alokasi Khusus memiliki beberapa kriteria, antara lain:

- Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS daerah.
- Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- Kriteria teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 80). Adapun populasi dari penelitian ini

adalah data laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota TA 2018 dan data Statistik Kemiskinan tahun 2018.

Menurut Sugiyono (2010:118), sampel adalah “bagian dari jumlah dan karakteristik yang didalam penelitian”. Pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah beberapa daerah yang mencantumkan informasi secara lengkap di laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota TA 2018 dan data Statistik Kemiskinan tahun 2018.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016:85), “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Adapun kriteria pengambilan sampel yaitu data atau informasi yang tercantum secara lengkap dari laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota TA 2018 dan data Statistik Kemiskinan tahun 2018.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut Supomo (1999:147) data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012:225).

Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota di Indonesia TA 2018 dan Data Statistik Kemiskinan tahun 2018 yang diperoleh dari www.bps.go.id dan www.djpk.kemenkeu.go.id.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi. Metode pengumpulan data dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun elektronik (Sukmadinata, 2012 : 221).

Data yang dikumpulkan bersumber dari data-data yang terdapat pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2018 yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan data Statistik Kemiskinan yang terpublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka perhitungannya menggunakan metode statistik yang dibantu dengan program SPSS. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji normalitas dan uji analisis regresi linier berganda.

a. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Aditya (2015), “statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian yang dilihat dari nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi”.

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian *Central Limit Theorem* (CLT), yaitu jika jumlah observasi cukup besar ($n > 30$), maka asumsi normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2003).

2) Uji Heterokedastisitas

Asumsi berikutnya dalam model regresi adalah residual memiliki nilai rata-rata nol, varians yang konstan residual suatu observasi tidak saling berhubungan dengan residual observasi lainnya. Untuk menguji heterokedastisitas dapat dilakukan Uji *Rank Spearman*.

3) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi adanya hubungan linear antar variable independen. Pengujian ini menggunakan perhitungan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai $VIF > 10$ menunjukkan adanya multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolinearitas.

4) Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi dalam penggunaan model regresi adalah tidak adanya autokorelasi. Untuk memeriksa ada atau tidaknya auto korelasi dapat digunakan Uji Durbin Watson.

c. Uji Hipotesis

1) Uji F (Simultan)

Menurut Ghozali (2016) dalam Berliani (2018), “pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara bersama-sama apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat”.

Uji F dikenal dengan sebutan uji serentak, uji anova, atau uji model. Uji F yaitu uji untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Dengan kata lain, uji f ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat signifikan atau tidak. Kriteria uji f yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $\text{sig } F > 0,05$. Artinya, variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $\text{sig } F < 0,05$. Artinya, variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2) Uji T (Parsial)

Uji T merupakan prosedur untuk menganalisis sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Uji T berfungsi untuk mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis. Perlakuan pada uji t ini terjadi saat nilai t hitung $< t$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika nilai t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kasus yang diuji secara acak. Kriteria data untuk uji t sampel bebas yaitu:

- a) Data dua sampel bersifat independen
- b) Sampel acak dari distribusi

3) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) yaitu untuk menguji besarnya pengaruh lebih dari satu variabel

independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi variabel yang lain konstan (Ghozali, 2011:96).

Berikut adalah model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini:

$$BFE = \alpha + \beta_1 RF_1 + \beta_2 PAD_2 + \beta_3 PK_3 + \beta_4 DAU_4 + \beta_5 DAK_5 + e$$

Keterangan:

BFE	: Belanja Fungsi Ekonomi
α	: Konstanta
$\beta_1 RF_1$: Ruang Fiskal
$\beta_2 PAD_2$: Pendapatan Asli Daerah
$\beta_3 PK_3$: Persentase Kemiskinan
$\beta_4 DAU_4$: Dana Alokasi Umum
$\beta_5 DAK_5$: Dana Alokasi Khusus
e	: Koefisien <i>error</i>

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Persentase Kemiskinan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Fungsi Ekonomi di Indonesia Studi Empiris di Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2018. Tabel 4.1 merupakan data pemilihan sampel yang telah diolah oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Kabupaten/kota di Indonesia	508
Kabupaten/kota yang terdapat di Laporan Realisasi APBD Tahun 2018	508
Kabupaten/kota yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sampel (data tidak lengkap)	3
Jumlah Sampel Penelitian	505

Sumber: Hasil Olah Data, 2019.

Sampel yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 505 Kabupaten/Kota dari total populasi Kabupaten/Kota di Indonesia sebanyak 508. Pemilihan objek penelitian didapatkan dari kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti, yakni data dan informasi yang lengkap dari Laporan Realisasi APBD TA 2018 dan Data Statistik Kemiskinan tahun 2018. Terdapat 3 kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam sampel penelitian ini antara lain Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder.

4.2 Analisis Data

a. Statistik Deskriptif

Penelitian ini meneliti pengaruh Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Persentase Kemiskinan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Fungsi Ekonomi di Indonesia Studi Empiris di Kabupaten/Kota se-Indonesia tahun 2018. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif
(Dalam rupiah)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BFE	505	12.917.513.027	521.520.733.376	93.874.617.814	69.545.142.260
RF	505	180.925.016.677	5.688.333.203.876	577.265.234.951	494.538.393.343
PAD	505	1.266.090.259	4.972.890.868.136	220.010.584.196	423.235.053.444
PK	505	1.76	43.63	13.0734	7.98951
DAU	505	215.830.009.000	2.060.202.697.000	678.323.154.513	284.952.986.039
DAK	505	26.626.702.999	737.019.669.306	213.068.256.003	106.484.754.356

Sumber data: Data sekunder diolah menggunakan SPSS 22.0.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2018 yang terlampir pada lampiran I, Belanja Fungsi Ekonomi tertinggi terdapat pada Kabupaten Majalengka yaitu sebesar Rp. 521.520.733.376. Sedangkan Belanja Fungsi Ekonomi terendah terdapat pada Kabupaten Tana Tidung yakni sebesar Rp. 12.917.513.027.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2018 yang terlampir pada lampiran I, Ruang Fiskal tertinggi terdapat pada Kota Surabaya yaitu sebesar Rp. 5.688.333.203.876. Sedangkan Ruang Fiskal terendah terdapat pada Kota Tomohon yakni sebesar Rp. 180.925.016.677. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2018 yang terlampir pada lampiran I, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terdapat pada Kota Surabaya yaitu sebesar Rp. 4.972.890.868.136. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah terdapat pada Kabupaten Deiyai yakni sebesar Rp. 1.266.090.259.

Berdasarkan Data Statistik Kemiskinan tahun 2018 yang terlampir pada lampiran II, Persentase Kemiskinan tertinggi terdapat pada Kabupaten Deiyai yaitu sebesar 43,63%. Sedangkan Persentase Kemiskinan terendah terdapat pada Kota Tangerang Selatan yakni sebesar 1,76%. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2018 yang terlampir pada lampiran I, Dana Alokasi Umum (DAU) tertinggi terdapat pada Kabupaten Bandung yaitu sebesar Rp. 2.060.202.697.000. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) terendah terdapat pada Kota Bontang yakni sebesar Rp. 215.830.009.000. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2018 yang terlampir pada lampiran I, Dana Alokasi Khusus (DAK) tertinggi terdapat pada Kabupaten Bandung yaitu sebesar Rp. 737.019.669.306. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) terendah terdapat pada Kota Serang yakni sebesar Rp. 26.626.702.999.

Berdasarkan tabel 4.2, nilai *mean* Belanja Fungsi Ekonomi yaitu sebesar 93.874.617.814,28 dengan standar deviasi sebesar 69.545.142.259,922. Nilai *mean* Ruang Fiskal sebesar 577.265.234.950,55 dengan standar deviasi sebesar 494.538.393.343,082. Nilai *mean* Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 220.010.584.195,97 dengan standar deviasi sebesar 423.235.053.444,497. Nilai *mean* Persentase Kemiskinan sebesar 13,0734 dengan standar deviasi sebesar 7,98951. Nilai *mean* Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 678.323.154.512,69 dengan standar deviasi sebesar 284.952.986.039,371. Nilai *mean* Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 213.068.256.002,73 dengan standar deviasi sebesar 106.484.754.356,236.

b. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model yang diuji telah memenuhi asumsi klasik. Untuk memenuhi kondisi tersebut harus dilakukan uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki sebaran normal.

Pada uji normalitas ini peneliti menggunakan uji *Central Limit Theorem* (CLT), yaitu jika jumlah observasi cukup besar ($n > 30$), maka asumsi normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2003). Jumlah n pada penelitian ini sebesar $505 > 30$. Hal ini menunjukkan bahwa data dapat dikatakan berdistribusi normal dan dapat disebut sebagai sampel besar.

2. Uji Heterokedastisitas

Jonathan dan Ely (2010:26), menyatakan bahwa korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel berskala ordinal, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Data dikatakan mempunyai hubungan yang signifikan jika nilai sig. $< 0,01$ atau sig. $> 0,05$. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.3, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Heterokedastisitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
Ruang Fiskal	<i>Correlation Coefficient</i>	-.046
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.305
	N	505
PAD	<i>Correlation Coefficient</i>	-.068
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.128
	N	505
Persentase Kemiskinan	<i>Correlation Coefficient</i>	.024
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.590
	N	505
DAU	<i>Correlation Coefficient</i>	-.016
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.715
	N	505
DAK	<i>Correlation Coefficient</i>	-.040
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	.373
	N	505
<i>Unstandardized Residual</i>	<i>Correlation Coefficient</i>	1.000
	<i>Sig. (2-tailed)</i>	
	N	505

Sumber data: Data sekunder yang diolah peneliti, 2019.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa *sig. (2-tailed)* Ruang Fiskal sebesar 0,305, *sig. (2-tailed)* Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,128, *sig. (2-tailed)* Persentase Kemiskinan sebesar 0,590, *sig. (2-tailed)* Dana Alokasi Umum sebesar 0,715, dan *sig. (2-tailed)* Dana Alokasi Khusus sebesar 0,373. Oleh karena itu, berdasarkan hasil uji di atas secara keseluruhan tidak terdapat gejala heterokedastisitas dalam penelitian ini.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan deteksi VIF (data kurang dari 10). Tabel 4.4 merupakan hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
RF	.487	2.054
PAD	.324	3.087
PK	.626	1.597
DAU	.335	2.987
DAK	.433	2.309

Sumber data: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 22.0.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memiliki nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen tersebut bebas dari multikolinearitas.

c. Uji Hipotesis

1. Uji F

Uji F merupakan analisis data untuk menguji hipotesis penelitian. Ada 2 cara yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan uji hipotesis f, yaitu dengan membandingkan nilai signifikan (*sig.*) atau nilai probabilitas hasil output anova dan membandingkan f hitung dengan nilai f tabel.

Pada penelitian ini akan melakukan uji f dengan membandingkan nilai signifikan (*sig.*) hasil output anova. Jika nilai *sig.* < 0,05, maka hipotesis diterima. Jika nilai *sig.* > 0,05, maka hipotesis dari penelitian ini ditolak. Berikut adalah hasil uji f yang telah dilakukan oleh peneliti:

Tabel 4.5
Hasil Uji F

Model		df	F-hitung	F-tabel	Sig.
1	<i>Regression</i>	5	128.595	2.232	.000 ^b
	<i>Residual</i>	499			
	Total	504			

Sumber data: Data sekunder yang diolah menggunakan SPSS 22.0.

Berdasarkan data hasil uji f di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai signifikan (*sig.*) sebesar 0,000. Ini berarti $0,000 < 0,05$, yang artinya hipotesis dari penelitian ini diterima.

2. Uji T

Uji “t” atau *Test “t”* adalah salah satu *test* statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa diantara dua buah *mean* sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan (Sudjiono, 2010:278).

Analisis uji t dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni dengan membandingkan antara t hitung dengan t tabel dan membandingkan nilai probabilitas dengan nilai signifikansi. Penelitian ini akan membandingkan nilai probabilitas atau nilai signifikansinya (sig.). Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima, dan jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak. Berikut merupakan hasil dari uji t, sebagai berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji T

Variabel	B	T	t-tabel	Sig.
(Constant)	1.956	1.507	1.965	.133
RF	.448	10.818	1.965	.000
PAD	.099	4.042	1.965	.000
PK	.009	3.608	1.965	.000
DAU	.331	4.499	1.965	.000
DAK	-.020	-.406	1.965	.685

Sumber data: Data sekunder diolah menggunakan SPSS 22.0.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai probabilitas atau signifikansi (sig.) dari variabel Ruang Fiskal sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti Ruang Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi yang terbukti secara statistik.
- 2) Nilai probabilitas atau signifikansi (sig.) dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi yang terbukti secara statistik.
- 3) Nilai probabilitas atau signifikansi (sig.) dari variabel Persentase Kemiskinan sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti Persentase Kemiskinan berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi yang terbukti secara statistik.
- 4) Nilai probabilitas atau signifikansi (sig.) dari variabel Dana Alokasi Umum sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi yang terbukti secara statistik.
- 5) Nilai probabilitas atau signifikansi (sig.) dari variabel Dana Alokasi Khusus sebesar $0,685 > 0,05$, maka H_0 diterima. Hal ini berarti Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi yang terbukti secara statistik.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Koefisien determinasi (R Square atau R kuadrat) atau disimbolkan dengan R^2 yang digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.750 ^a	.563	.559	.36007

Sumber data: Data sekunder diolah menggunakan SPSS 22.0.

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diinterpretasikan bahwa koefisien determinasi (R Square atau R kuadrat) adalah sebesar 0,563 yang berasal dari hasil pengkuadratan nilai R. Nilai R kuadrat sebesar 0,563 atau sama dengan 56,3%. Ini berarti variabel-variabel independen seperti Ruang Fiskal (RF), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Kemiskinan (PK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Fungsi Ekonomi (BFE) sebesar 56,3%. Sisanya (100% - 56,3% = 43,7%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau variabel yang tidak diteliti.

Besarnya variabel lain disebut juga error (e). Adapun rumus error (e) = 1 - R², sehingga didapatkan nilai *error* sebesar 0,562. Nilai R square berkisar antara 0-1. Jika nilai R square mendekati 1 berarti pengaruh semakin kuat. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.6, didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{BFE} = 1,956 + 0,448 \text{ RF} + 0,099 \text{ PAD} + 0,009 \text{ PK} + 0,331 \text{ DAU} - 0,020 \text{ DAK} + e$$

4.3 Pembahasan

a. Pengaruh Ruang Fiskal terhadap Belanja Fungsi Ekonomi

Hasil analisis data di atas menyebutkan bahwa Ruang Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi yang terbukti secara statistik. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya Ruang Fiskal dapat memberikan dampak peningkatan Belanja Fungsi Ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Enjarwati, Tria dan Djoko Mursinto (2018) bahwa Ruang Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 1990-2015.

b. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Fungsi Ekonomi

Hasil analisis data di atas menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi yang terbukti secara statistik. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberikan dampak peningkatan Belanja Fungsi Ekonomi. Hasil ini bertentangan dengan penelitian dari Syam, et al (2018) bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

c. Pengaruh Persentase Kemiskinan terhadap Belanja Fungsi Ekonomi

Hasil analisis data di atas menyebutkan bahwa Persentase Kemiskinan berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi yang terbukti secara statistik. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya Persentase Kemiskinan dapat memberikan dampak peningkatan Belanja Fungsi Ekonomi. Penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia, Sekar Indah dan Wahyono (2019) bahwa Jumlah Penduduk Miskin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Bantuan Sosial.

d. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Fungsi Ekonomi

Hasil analisis data di atas menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi yang terbukti secara statistik. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU) dapat memberikan dampak peningkatan Belanja Fungsi Ekonomi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Amalia dan Wahyono (2019) bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial.

e. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Fungsi Ekonomi

Hasil analisis data di atas menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Fungsi Ekonomi yang terbukti secara statistik. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak memberikan dampak terhadap peningkatan Belanja Fungsi Ekonomi. Hasil penelitian terhadap Dana Alokasi Khusus ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari dan Mujiyati (2019) bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil uji Parsial yang telah dilakukan, Ruang Fiskal berpengaruh signifikan terhadap Belanja Fungsi Ekonomi. Jika pemerintah daerah di Indonesia memfokuskan pada peningkatan Ruang Fiskal, maka Belanja Fungsi Ekonomi juga akan meningkat.
- b. Berdasarkan hasil uji Parsial yang telah dilakukan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Fungsi Ekonomi. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki pemerintah daerah mengalami peningkatan, maka pemerintah daerah semakin mampu dalam memenuhi kebutuhan Belanja Fungsi Ekonominya.
- c. Berdasarkan hasil uji Parsial yang telah dilakukan, Persentase Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Fungsi Ekonomi. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya Persentase Kemiskinan dapat memberikan dampak peningkatan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan Belanja Fungsi Ekonominya.
- d. Berdasarkan hasil uji Parsial yang telah dilakukan, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Fungsi Ekonomi. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah semakin mampu memenuhi kebutuhan Belanja Fungsi Ekonominya.
- e. Berdasarkan hasil uji Parsial yang telah dilakukan, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Fungsi Ekonomi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

- a. Data yang diambil dalam penelitian ini hanya data dari Kabupaten/Kota yang memberikan informasi secara lengkap terhadap variabel-variabel yang bersangkutan.
- b. Literatur-literatur pendukung beberapa variabel penelitian ini masih sangat minim.
- c. Variabel independen yang digunakan terkait dengan Belanja Fungsi Ekonomi hanya berjumlah lima variabel. Variabel-variabel tersebut yaitu Ruang Fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Kemiskinan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga perlu adanya variabel tambahan lainnya.

- d. Data yang digunakan hanya untuk periode tahun 2018 saja, yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD dan Data Statistik Kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

5.3 Saran

Berikut adalah saran dari penelitian yang dilakukan, antara lain:

- a. Seharusnya data yang digunakan pada penelitian selanjutnya menggunakan variabel yang memberikan informasi lengkap, sehingga data yang digunakan juga akan lengkap dan valid.
- b. Literatur yang dicari harus sesuai atau paling tidak mendekati teori yang sesuai dengan variabel penelitian yang diambil.
- c. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya peneliti menambahkan variabel independen lain, sehingga dapat diketahui faktor lain yang dapat mempengaruhi Belanja Fungsi Ekonomi.
- d. Sebaiknya peneliti mengambil data dari Laporan Realisasi APBD untuk beberapa periode tahun, bukan hanya untuk satu periode tahun saja.

5.4 Implikasi

Upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan antardaerah, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan seperti mengentaskan kemiskinan, menggerakkan kegiatan ekonomi di pusat maupun daerah, dan meningkatkan alokasi dana langsung ke daerah secara merata. Namun, upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tidak akan berjalan optimal jika pemerintah tidak dapat memberdayakan kemampuan pelaku ekonomi, yaitu masyarakat. Investasi swasta juga sangat mendukung dalam pergerakan kegiatan ekonomi di daerah. Berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan akses untuk memperoleh sumber daya ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia di masing-masing daerah.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam Naskah Setelah Perubahan BAB IX tentang Pembangunan Daerah, selama ini upaya pemberdayaan bagi kelompok masyarakat atau keluarga miskin dilakukan melalui penyediaan akses dan bantuan dari pemerintah dalam bentuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberian bantuan modal, manajemen usaha, pendampingan, dan pembangunan prasarana pendukung, namun hal tersebut ternyata belum cukup memadai, sedangkan upaya perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dalam menghadapi masalah sosial-ekonomi atau mendapat musibah di luar kehendaknya telah dilakukan melalui berbagai skema perlindungan secara informal maupun formal dengan dukungan keluarga, kelompok masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, usaha swasta, dan pemerintah.

Pemerintah daerah juga dapat melakukan sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat dalam pembayaran kewajiban dalam rangka pembayaran pajak sebagai salah satu penerimaan daerah. Dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, akan meningkatkan pendapatan daerah sehingga pemerintah dapat melakukan Belanja Fungsi Ekonomi nya dan kebutuhan masyarakat pun juga akan terpenuhi dengan baik dan merata.

Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia sebaiknya lebih tegas lagi dalam pelaksanaan kebijakan penerimaan pendapatan di daerah. Hal ini baik dilakukan agar pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan Belanja Fungsi Ekonomi, seperti pembuatan infrastruktur di daerah, dan sebagainya. Apabila Belanja Fungsi Ekonomi di suatu daerah dikatakan besar, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat. Hal ini juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Referensi

- Aldila, Nova Eka. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2013 – 2016)*, www.eprints.ums.ac.id. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alfista, Meilis. 2019. *Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2012 – 2017*, www.eprints.ums.ac.id. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Al-Khawarizmi, Damang Averroes. 2011. *Pendapatan Asli Daerah*, www.negarahukum.com, diakses tanggal 26 September 2019, pukul 10.23 WIB.
- Amalia, Rika Sekar Indah. 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Belanja Bantuan Sosial (Studi Empiris Se-Pulau Jawa 2017)*, www.eprints.ums.ac.id. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Amiyati, Nuri dan Andi Dwi Bayu Bawono. 2018. *Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Terhadap Pengalokasian Belanja Pendidikan (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Wonogiri Tahun 2017)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seminar Nasional dan *The 5th Call for Syariah Paper*, ISSN 2460-0784.
- Arhando, Pramdia. 2019. *Wow, Orang Miskin Di Indonesia Makin Sedikit*, www.moneysmart.com, diakses tanggal 26 September 2019, pukul 11.01 WIB.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Persentase Penduduk Miskin Maret 2018 Turun Menjadi 9,82 Persen*, www.bps.go.id, diakses tanggal 26 September 2019, pukul 10.58 WIB.
- Bawono, Andy Dwi Bayu et al. 2017. *Analisis Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Pengalokasian Belanja Wajib Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Studi pada Kabupaten/Kota se-Jawa)*. ISSN: 2407-9189.
- Biro Analisa dan Pelaksanaan APBN. 2018. *Ruang Fiskal dalam APBN*, www.dpr.go.id, diakses tanggal 26 September 2019, pukul 11.00 WIB.
- Caksono. 2019. *Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi*, www.mediaindonesia.com, diakses tanggal 25 September 2019, pukul 20.13 WIB.
- Enjarwati, Tria dan Djoko Mursinto. 2018. *Impact Of Government Fiscal Space And Manpower To The Gross Domestic Products Of Indonesia Period 1990-2015*. Journal of Developing Economics, ISSN : 2541-1012.
- Gayati, Mentari Dwi. 2019. *Menkeu Paparkan Lima Fokus Belanja Pemerintah Tahun 2020*, www.antaranews.com, diakses tanggal 25 September 2019, pukul 16.32 WIB.
- Hadade, Muhammad Ikhsan. 2018. *Fungsi Anggaran dalam Berbagai Aspek*, www.bpkad.banjarkab.go.id, diakses tanggal 11 Oktober 2019, pukul 09.17 WIB.
- Haksar et al. 2018. *Kesiapan Ekonomi: Kebutuhan Akan Ruang Fiskal*, www.imf.org, diakses tanggal 26 September 2019, pukul 09.56 WIB.
- Hidayat, Anwar. 2016. *Uji F dan Uji T*, www.statistikian.com, diakses 27 September 2019, pukul 21.43 WIB.
- Ibrahim dan Abdul Irawati. 2019. *Effect of Special Allocation Funds (DAK), Capital Expenditures, and Investment on Economic Growth in the Sulawesi Region*. Jembura Equilibrium Journal, P-ISSN 2655-9110.
- Jayani, Dwi Hadya. 2019. *Jumlah Penduduk Indonesia 269 Juta Jiwa, Terbesar Keempat di Dunia*, www.katadata.co.id, diakses tanggal 15 Oktober 2019, pukul 11.48 WIB.

- Khrisna. 2013. *Uji T Sampel Independen*, www.datariset.com, diakses tanggal 27 September 2019, pukul 21.30 WIB.
- Kurniasari, Anindya. 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Povinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)*, www.eprints.ums.ac.id. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lupu et al. 2018. *The Impact of Public Expenditures on Economic Growth: A Case Study of Central and Eastern European Countries*. Journal Emerging Markets Finance and Trade, ISSN: 1540-496X.
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Pringadi. 2017. *Fiskal dan Ruang Fiskal (Fiscal Space)*, www.catatanpringadi.com, diakses tanggal 25 September 2019, pukul 20.36 WIB.
- Raharjo, Sahid. 2017. *Tutorial Analisis Korelasi Rank Spearman dengan SPSS*, www.spssindonesia.com, diakses tanggal 15 Oktober 2019, pukul 16.43 WIB.
- Ratmono, dan Mahfud Sholihin. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Riadi, Muchlisin. 2015. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, www.kajianpustaka.com, diakses tanggal 26 September 2019, pukul 10.32 WIB.
- Syam et al. 2018. *Influence of PAD and DAU on Economic Growth with Capital Expenditure as an Intervening Variable on Regency and Municipal Government in South Kalimantan Province*. Journal Research and Analysis: Economy, e-ISSN: 2597-6591 dan p-ISSN: 0000-0000.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum.
- Unknown. 2014. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, www.info-anggaran.com, diakses tanggal 11 Oktober 2019, pukul 09.42 WIB.
- Unknown. 2018. *Otonomi Daerah: Pengertian, Asas, Tujuan, Contoh*, www.sosiologi.com, diakses tanggal 1 Oktober 2019, pukul 12.05 WIB.
- Unknown. 2019. *BAB IX: Pembangunan Dearah*, www.bappenas.go.id, diakses tanggal 21 Oktober 2019, pukul 12.30 WIB.
- Yoanika, Rullynanto Cahyo. 2018. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dengan Belanja Daerah Bidang Pendidikan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa*, www.eprints.ums.ac.id. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zakky. 2017. *Kondisi Geografis Indonesia Beserta Keadaan Penduduk & Pengaruhnya*, www.zonareferensi.com, diakses tanggal 15 Oktober 2019, puku 11.45 WIB.